

# BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BIDANG BINA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

# BKAD PROVINSI SUMATERA UTARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb,  
Salam Sejahtera,

Dengan rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayahnya kita dapat beraktifitas menunaikan tanggungjawab dan tugas yang diamanahkan kepada kita.

Proses reformasi yang harus dijalankan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditindaklanjuti dengan terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana Nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 5 Bidang diantaranya Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan untuk urusan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota



## 33 WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA

- 1.Kabupaten Langkat
- 2.Kota Binjai
- 3.Kota Medan
- 4.Kabupaten Deli Serdang
- 5.Kabupaten Serdang Bedagai
- 6.Kota Tebing Tinggi
- 7.Kabupaten Batu Bara
- 8.Kabupaten Asahan
- 9.Kota Tanjung Balai
- 10.Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 11.Kabupaten Labuhanbatu
- 12.Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 13.Kabupaten Padang Lawas Utara
- 14.Kabupaten Padang Lawas
- 15.Kota Padangsidimpuan
- 16.Kabupaten Tapanuli Selatan
- 17.Kabupaten Mandailing Natal
- 18.Kabupaten Humbang Hasundutan
- 19.Kabupaten Tapanuli Utara
- 20.Kabupaten Toba
- 21.Kabupaten Samosir
- 22.Kabupaten Tapanuli Tengah
- 23.Kota Sibolga
- 24.Kota Gunungsitoli
- 25.Kabupaten Nias
- 26.Kabupaten Nias Selatan
- 27.Kabupaten Nias Utara
- 28.Kabupaten Nias Barat
- 29.Kabupaten Simalungun
- 30.Kota Pematangsiantar
- 31.Kabupaten Karo
- 32.Kabupaten Dairi
- 33.Kabupaten Pakpak Bharat

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- 1.Sub Bidang Bina Keuangan I;
- 2.Sub Bidang Bina Keuangan II;
- 3.Kelompok Jabatan Fungsional



Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/kota penyelenggaraan fungsi menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1.Menyelenggarakan pergelaran keuangan daerah terhadap 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Kabupaten/kota;
- 2.Evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranpekada Kabupaten/Kota tentang APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga);
- 3.Evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/ atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/ Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
- 4.Fasilitas kebutuhan Pemerintah Pusat Terhadap data Keuangan daerah 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota
- 5.Fasilitas penyebarluasan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah terbagi 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 6.Menjelaskan hal-hal terkait Konsultasi dan Koordinasi kepada 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 7.Perangkat Gubernur Sumatera Utara dalam Pengenaan sanksi administrasi kepada 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota atas pelanggaran di bidang pengelolaan Keuangan Daerah;

Untuk Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota Mempunyai uraian tugas antara lain:

- 1.Melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan keuangan daerah terhadap 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 2.Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
- 3.Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
- 4.Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
- 5.Memfasilitasi kebutuhan Pemerintah Pusat terhadap data keuangan daerah 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
- 6.Memfasilitasi penyebarluasan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah bagi 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 7.Menerima dan memberikan penjelasan terkait konsultasi dan Koordinasi Kepada 33 (tiga puluh tiga) DPRD Kabupaten/ Kota;



Untuk Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota Mempunyai uraian tugas antara lain:

1. Melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan keuangan daerah terhadap 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
3. Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
4. Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
5. Memfasilitasi kebutuhan Pemerintah Pusat terhadap data keuangan daerah 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
6. Memfasilitasi penyebarluasan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah bagi 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Menerima dan memberikan penjelasan terkait konsultasi dan Koordinasi Kepada 33 (tiga puluh tiga) DPRD Kabupaten/ Kota;



Capaian Pelaksanaan Pembinaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan mekanisme Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
2. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2022 telah mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebanyak ±Rp30 Milyar yang diikuti oleh 22 Kabupaten/Kota antara lain Kota Binjai, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Nias, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Batubara, Kabupaten Karo, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2022 untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diperoleh 9 (Sembilan) kali berturut-turut, dan untuk Pemerintah Kabupaten Kota untuk Laporan Keuangan Tahun 2022 antara lain untuk capaian WTP sebanyak 27 Kabupaten/Kota atau 82% dan capaian WDP sebanyak 6 Kabupaten/Kota atau 18%

Selanjutnya kegiatan yang sudah terlaksana di Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota pada tahun 2023

### **Bulan Januari 2023**

- Kegiatan Zoom Meeting Seri I tentang Penajaman Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya TA. 2023 bersama Kepala BPKAD, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Bina Marga dan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara dengan mengundang narasumber dari Dirjend Bina Keuda Kemendagri RI, Inspektur IV Irjend Kemendagri RI dan Kepala BKAD Provinsi Sumatera Utara.

- Kegiatan Zoom Meeting Seri II tentang Tindak Lanjut Pembahasan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 211/PMK.07/2022 dan 212/PMK.07/2022 bersama Kepala BPKAD, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Bina Marga dan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara dengan mengundang narasumber dari Dirjend Bina Keuda Kemendagri RI, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provsu Kemenkeu RI, dan Kepala BKAD Provinsi Sumatera Utara.



### **Bulan Februari 2023**

- Kegiatan Zoom Meeting Seri III tentang Koordinasi Ketersediaan Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara pada Tahun 2024 bersama Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Inspektur dan Kesbangpol Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara dengan mengundang narasumber dari Dirjend Bina Keuda Kemendagri RI, Kepala BKAD Provsu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provsu dan Kemenkeu RI

## Bulan Maret 2023

- Kegiatan Zoom Meeting Seri IV tentang Program Prioritas dan Isu Strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bagi Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara pada Tahun 2024 bersama Kepala BPKAD, dan Kepala Bappelitbang pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara dengan mengundang Narasumber dari Dirjend Bina Keuda Kemendagri RI, Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, dan Kepala BKAD Provinsi Sumatera Utara.
- Menerima Kunjungan dari Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka Permohonan Silaturahmi DPRD Kab. Labuhanbatu Utara bersama Gubernur Sumatera Utara bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprovsu, Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Kasubbid Bina Keuangan II, dan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.





### Bulan April 2023

- Kegiatan Zoom Meeting Seri V tentang Realisasi Pemberian THR dan Gaji ke 13 pada Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara bersama Pimpinan OPD Pemprov, Kepala BPKAD, dan Kepala Kepegawaian pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara dengan mengundang Narasumber dari Dirjend Bina Keuda Kemendagri RI, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BKAD Provinsi Sumatera Utara.
- Kegiatan Zoom Meeting Seri VI tentang Tindaklanjut Pembahasan Realisasi Pemberian THR pada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2023 bersama Pimpinan OPD Pemprov, Kepala BPKAD, dan Kepala Kepegawaian pada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan mengundang Narasumber dari Dirjend Bina Keuda Kemendagri RI, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, Kepala BKAD Provinsi Sumatera Utara.
- Menerima Kunjungan dari Kabupaten Nias Barat dalam rangka Melaksanakan Koordinasi terkait DAU ditentukan sehubungan dengan PMK 212 di BKAD Provinsi Sumatera Utara bersama Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Kasubbid Bina Keuangan II dan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- Menerima Kunjungan dari Kabupaten Asahan dalam rangka Konsultasi Badan Musyawarah DPRD, membicarakan tentang mekanisme dan perhitungan pemberian Tunjangan Kinerja Tambahan, Penghasilan Pegawai (TPP) serta Insentif pada BLUD bersama Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Kasubbid Bina Keuangan II, Staf Pengelola Data Keuangan Daerah, Staf Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan dan Staf Subbid Bina Keuangan Daerah II.
- Menerima kunjungan dari Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka Melaksanakan kunjungan kerja Konsultasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan umum yang ditentukan penggunaannya TA. 2023 sesuai Permenkeu RINomor 212/PMK.07/2022 bersama Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota, Kasubbid Bina Keuangan II, Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan Staf Subbid Bina Keuangan Daerah II.



## Bulan Mei 2023

- Kegiatan Zoom Meeting Seri VII tentang Tindaklanjut terkait Implementasi Penggunaan Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya TA. 2023 sesuai Permenkeu RI Nomor 212/PMK 07/2022 bagi Kabupaten/Kota Se-Sumut dan Pemanfaatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA. 2024 bersama Kepala BKAD Kabupaten/Kota, Inspektur Kabupaten/Kota dengan mengundang Narasumber dari Dirjend Bina Keuda Kemendagri RI, Kepala BKAD Provinsi Sumatera Utara.
- Kegiatan Zoom Meeting Seri VIII tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional terkait Penggunaan Anggaran Honorarium, Dana BOS dan Aset Pemerintah Daerah bersama bersama Kepala BPKAD, Kepala Bappelitbang, Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektur Daerah pada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan mengundang Narasumber dari Dirjend Bina Keuda Kemendagri RI, Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemendagri RI, dan Kepala BKAD Provinsi Sumatera Utara.
- Menerima Kunjungan dari Kabupaten Batubara dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Tentang usulan Ranperda Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2023 Kab. Batu Bara tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya bersama Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota, Kasubbid Bina Keuangan I, Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan Staf Bina Keuangan Daerah.
- Menerima Kunjungan dari Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi DPRD Kabupaten Samsir terkait LPJ Kepala Daerah ke Kantor BKAD Provinsi Sumatera Utara bersama Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Kasubbid Bina Keuangan I, Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, dan Staf Bina Keuangan Daerah.
- Kegiatan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah Terkait Tahapan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dalam SIPD pada tanggal 25 s/d 26 Mei 2023 bertempat di Le Polonia Hotel dan Convetion Medan.





## Bulan Juni 2023

- Menerima Kunjungan dari Kabupaten Toba dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Komisi B DPRD Kabupaten Toba terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD bersama Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Kasubbid Bina Keuangan II, Staf Bina Keuangan Daerah dan PTT Bidang Bina Keuangan Daerah.
- Kegiatan Koordinasi Laporan Keuangan Mencapai WTP bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Kantor Gubernur Sumatera. Dalam rangka meningkatkan kinerja secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah, serta sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
- Kabupaten/Kota yang telah mengantarkan berkas/dokumen Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 untuk di evaluasi yaitu Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Kegiatan Rapat Evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Juni 2023 bertempat di Le Polonia Hotel dan Convetion Medan.
- Pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 27 Juni 2023 bertempat di ruang rapat Raja Inal Siregar Lt. 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara.